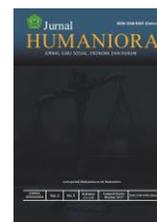


Available online at [www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora)  
ISSN 2548-9585 (Online)

**Universitas Abulyatama**  
**Jurnal Humaniora**



## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Alokasi Apbd Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015-2018**

**Rahmah Yulianti\*<sup>1</sup>, Khairuna<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Serambi Mekkah Fakultas Ekonomi, Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, 23245, Indonesia

\*Email Korespondensi: rahmah.yulianti@serambi mekkah.ac.id

Diterima 22 Februari 2020; Disetujui 26 Maret 2020; Dipublikasi 1 April 2020

**Abstract:** *The objective of this study is to examine the influence of economic growth, poverty on the allocation of the Aceh Provincial Budget for the 2015-2018 period. Economic growth is measured by GDP, poverty is measured by the poverty line (GK), and the APBD allocation is measured by the realization of regional income, expenditure and regional financing. The population in this study are data and information regarding the APBD allocation, the economic sector PDRB and the Poverty Line. This study uses APBD allocation data, economic growth data and poverty data which is seen from the survey conducted by BPS 2015-2018 period, and uses census method. To test the hypothesis, this study uses multiple linear regression analysis. Results show that, (1) economic growth and poverty simultanly, have influence to APBD allocation, (2) economic growth have positive influence to APBD allocation, (3) poverty have negative influence to APBD allocation.*

**Keywords:** *Economic growth, poverty, APBD allocation*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh tahun anggaran 2015-2018. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB, kemiskinan diukur dengan Garis kemiskinan (GK), dan alokasi APBD diukur dengan realisasi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Populasi pada penelitian ini pada data dan informasi mengenai alokasi APBD, PDRB sektor ekonomi dan Garis Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data alokasi APBD, data pertumbuhan ekonomi dan data kemiskinan yang dilihat dari survey yang dilakukan BPS tahun anggaran 2015-2018, dan menggunakan metode sensus. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa, (1) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi APBD, (2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi APBD, (3) kemiskinan berpengaruh negatif terhadap alokasi APBD.

**Kata kunci :** *Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, alokasi APBD*

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang membahas dan menyetujui bersama dengan

pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah merupakan

penerimaan dan pengeluaran daerah istilah lain disebut sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Afriana, 2016: 3). Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya sama dengan tujuan dan fungsi APBN. komponen APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian daerah, apabila ketiganya diolah dengan baik maka perekonomian suatu daerah akan baik pula. (Afriana, 2016: 4).

Provinsi Aceh merupakan daerah yang diberikan Kebijakan otonomi khusus (Otsus) diberlakukan melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai desentralisasi atau Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang diharapkan membawa perubahan mendasar kepada semua bidang pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan menggambarkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang tujuan utamanya agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin baik (Depkeu RI, 2008).

Pada tahun 2017 Provinsi Aceh memperoleh APBD sebesar Rp. 14.733.700.000,- dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.198.500 jiwa. (Sumber: Data Bappeda, 2017). Dengan jumlah anggaran yang begitu besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, tentunya anggaran ini dapat di alokasikan dengan baik dengan efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat aceh, sehingga pada sektor ekonomi akan mengakibatkan perubahan yang maksimal.

Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perubahan-perubahan pada sektor ekonomi, dengan indikator yaitu meningkatnya produksi nasional, pendapatan nasional, dan pendapatan perkapita. Kondisi tersebut secara terus-menerus akan berlangsung. Terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun beberapa para pakar ekonomi mendefinisikan dengan istilah yang sama.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Sehingga jika pertumbuhan ekonomi ada maka pembangunan ekonomi juga ikut berperan, perbedaan pada berbagai sektor ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi. Hadirnya usaha-usaha baru dan adanya peningkatan dalam kegiatan ekspor dan impor akan membawa perubahan pada sektor industri dan sektor perdagangan. Hal ini juga dapat berkaitan dengan sektor pertanian yang akan mengalami perubahan melalui pembangunan di bidang sarana dan prasarana, seperti penambahan ruas jalan. (Fatmi, 2010: 17).

Fenomena di Provinsi Aceh yang berkaitan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yaitu, dimana penetapan APBA tidak tepat waktu, kualitas anggaran yang belum optimal yang disebabkan perencanaan belum fokus, kurang tepat sasaran, indikator program/ kegiatan belum terukur (*outcome*), sistem E – planning dan E- Budgeting belum terintegrasi, pendanaan untuk pembangunan aceh masih tertumpu pada APBA, dan kemiskinan masih tinggi yakni 15,97% pada bulan Maret 2018. (Sumber: data BPS diolah oleh Bappeda, pada Seminar Peringatan Hari Statistik Nasional, 2018).

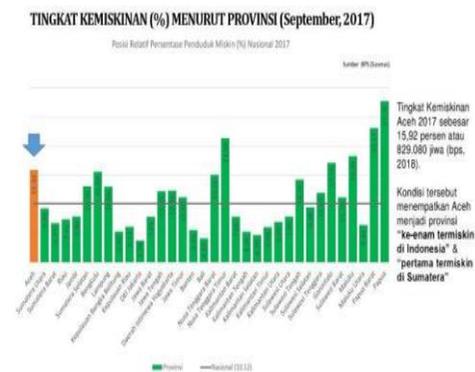
Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) merupakan aktivitas yang mengalami perubahan

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. permasalahan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat meningkatnya faktor-faktor produksi yang pada umumnya tidak selalu diikuti oleh meningkatnya produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari angka PDRB setiap tahunnya di suatu daerah.

Produk Domestik Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah region dalam jangka waktu tertentu. Agar belanja daerah dapat meningkat, maka PDRB harus meningkat, karena semakin besar PDRB, maka pendapatan kabupaten/kota akan semakin besar pula, sehingga pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut sebagai kepentingan pelayanan publik. (Lin dan Lun 2000 dalam Gorahe dkk, 2013:3). Sehingga masyarakat daerah tersebut tidak mengalami kemiskinan atau masyarakat sejahtera.

Kemiskinan didefinisikan dengan situasi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar tersebut seperti: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Provinsi Aceh merupakan urutan ke enam termiskin di Indonesia dan urutan pertama di Sumatra. (BPS, 2018). Hal ini tentu tidak sesuai dengan dana otonomi khusus APBD yang melimpah di Aceh. Berikut grafik tingkat kemiskinan (%) menurut Provinsi (September, 2017).



Grafik 1. Tingkat Kemiskinan

Menurut Prof. DR. Raja Masbar pada Seminar Peringatan Hari Statistik Nasional, 2018, keadaan ini disebabkan adanya *inclusion error dan Exclusion error*. Dimana eror ini disebabkan adanya elite desa, seperti: adanya kaitan keluarga, kaitan bisnis, kaitan politik (kelompok teman) dengan elite desa dan akumulasi aset. Sehingga alokasi APBD belum tepat sasaran. Namun seiring dengan pengeluaran pemerintah yang meningkat pada APBD serta pelaksanaan otonomi daerah selama beberapa tahun, ternyata belum tampak adanya perubahan yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat (Paramitha, 2012).

Hal ini juga disebabkan bahwa realisasi anggaran pada periode Januari –Maret masih kecil, dan sebagian besar hanya fokus pada belanja pegawai, yang penyebab utamanya yaitu keterlambatan dalam penetapan APBD 2018, dana desa di Tw. I 2018 juga masih belum terealisasi sesuai harapan, dan pertumbuhan ekonomi di

Aceh Tw. I 2018 sebesar -1,24% (q to q) dan 3,26% (y on y). (Sumber: Wahyudin, BPS, pada seminar Hari Statistik Nasional, 2018). Penelitian terdahulu pada umumnya telah melakukan kajian keterkaitan antara APBD dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, namun penelitian yang saya kaji ini masih adanya keterbatasan khususnya pada konteks periode waktu terlalu singkat yaitu 2,5 tahun sehingga memungkinkan hasil penelitian kurang representatif, juga masih banyak faktor lain yang mempengaruhi alokasi APBD yang belum dikaji dalam penelitian ini, seperti IPM.

## KAJIAN PUSTAKA

### APBD dan Alokasi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai aktivitas dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) sebagai salah satu alat untuk peningkatan pelayanan publik juga peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keunggulan keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004 : 223 dalam Debby Ch, 2015: 4).

Secara umum komponen APBD terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Belanja

Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 1. Pendapatan dan Belanja APBA 2015-2018**  
**Pendapatan dan Belanja APBA Triwulan -I 2015-2016**

Komponen Pendapatan	Realisasi Pendapatan			
	III 2015		III 2016	
	Nilai (RpJuta)	%	Nilai (RpJuta)	%
PAD	612.95	32,55%	1.476.20	71,75%
Perimbangan	1.328.43	80,05%	1.201.94	71,94%
Otsus+	3.053.57	36,06%	6.465.70	73,36%
<b>Total Pendapatan Provinsi</b>	<b>4.994.95</b>	<b>41,59%</b>	<b>9.143.86</b>	<b>72,90%</b>

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, zilah 31 Aceh

Komponen Belanja	Realisasi Belanja			
	III 2015		III 2016	
	Nilai (RpJuta)	%	Nilai (RpJuta)	%
Belanja Pegawai	628.193	65,14%	699.593	68,33%
Belanja Modal	564.628	24,46%	955.949	37,02%
Belanja Barang	1.642.857	35,02%	2.053.305	48,58%
Belanja Bansos	231.212	89,55%	216.261	87,47%
Belanja Lainnya	-	0,00%	3.614.695	75,42%
<b>Total Belanja Provinsi</b>	<b>628.193</b>	<b>65,14%</b>	<b>699.593</b>	<b>68,33%</b>

## Pendapatan dan Belanja APBA Triwulan-I 2017- 2018

PENDAPATAN APBA	Triwulan I-2017			Triwulan I-2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	2240,27	2475,01	11,01	2324,66	261,24	11,24
Pendapatan Pajak Daerah	1299,74	1271,70	11,21	1371,63	247,23	18,02
Pendapatan Restribusi Daerah	11,05	0,87	7,47	17,83	0,33	1,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	225,36	0,00	0,00	162,38	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	708,36	749,93	10,57	742,28	13,61	1,87
Pendapatan Perimbangan /transfer	12123,38	7342,29	6,06	12274,21	925,57	7,54
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	77,61	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>14448,36</b>	<b>981,79</b>	<b>6,79</b>	<b>14622,48</b>	<b>1186,94</b>	<b>8,12</b>

Sumber: Dinas Keuangan Aceh

BELANJA APBA	Triwulan I-2017			Triwulan I-2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>8377,29</b>	<b>357,36</b>	<b>4,27</b>	<b>10985,26</b>	<b>200,04</b>	<b>1,82</b>
Belanja Pegawai	2451,73	321,58	13,12	2452,20	73,21	2,99
Belanja Barang dan Jasa	4976,42	35,78	0,72	7587,75	1,15	0,02
Belanja Hibah	680,89	0,00	0,00	708,61	125,67	17,73
Belanja Bantuan Sosial	268,25	0,00	0,00	236,71	0,00	0,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>2475,10</b>	<b>1,80</b>	<b>0,07</b>	<b>3300,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>40,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer</b>	<b>4019,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>14911,63</b>	<b>359,16</b>	<b>2,41</b>	<b>15084,00</b>	<b>200,09</b>	<b>1,33</b>

Sumber: Dinas Keuangan Aceh 2015-2018.

Pendapatan Daerah dalam penelitian ini mengambil Kapasitas Fiskal karena kapasitas fiskal adalah hal yang benar-benar dihasilkan dari daerah itu sendiri. Belanja Daerah memfokuskan pada belanja modal dimana belanja modal sebagai komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah dalam menghasilkan *output* berupa aset tetap yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau digunakan oleh masyarakat (seperti infrastruktur, gedung olahraga, sekolah dll), dan ada pemanfaatan secara tidak langsung oleh publik (seperti gedung pemerintahan). Sedangkan pembiayaan daerah mengambil pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. (Khuzaironi, 2015: 11-12).

Alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang bagiannya mencakup selain

sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Menurut Tang (2015), semakin besar sumber daya birokrasi negara, yaitu keadaan keuangan suatu negara akan semakin banyak perluasan pengeluaran publik untuk program kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena kapasitas situasi yang lebih luas akan semakin meresap untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002), menguraikan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

**Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran dan Tingkat Kemiskinan Di Sumatra**

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDIK	JUMLAH APBD (Rp Juta)	RINCIAN BELANJA (%)				DANA DAERAH (Rp Juta)	TOTAL DANA DAERAH (Rp Juta)	REALISASI INVESTASI (%)	INDIKATOR PEMBANGUNAN (%)				KET
				BTL	BL	BM	BM				MISKIN	MGK	IPM	PIBT	
1	ACEH	5.389.500	14.720.200	49	71	17	4.457.515	489	61,3	15,92	7,50	70,60	3,20		
2	BENGKULU	1.094.300	3.344.000	50	50	30	945.000	400	22,7	15,80	3,00	69,95	5,30		
8	LAMPUNG	8.289.600	6.802.528	46	34	17	2.891.398	252	1.800,40	13,69	4,60	68,25	5,15		
6	SUMATERA SELATAN	8.207.982	6.844.817	52	48	26	2.309.305	279	1.734,70	13,71	4,30	68,86	5,03		
9	SUMATERA UTARA	14.262.100	11.034.084	47	33	14	2.168.340	152	1.440,30	10,22	5,80	70,57	5,18		
4	JAMBI	3.515.000	4.342.309	55	45	23	1.027.474	209	228,9	8,19	4,00	69,99	4,37		
5	RIAU	6.657.900	11.008.150	49	51	23	1.254.689	188	1.227,10	7,76	7,40	71,79	2,23		
3	SUMATERA BARAT	5.321.500	6.228.977	47	33	15	790.787	140	237,7	6,87	5,00	71,24	5,26		
9	KEPULAUAN RIAU	2.082.700	3.360.898	43	57	17	221.526	106	183,2	6,66	7,60	74,45	5,03		
7	BANGKA BELITUNG	1.609.900	2.666.123	56	44	17	264.572	185	253,3	5,30	2,00	69,99	4,11		

Sumber: Data APBD (dalam nilai Rp Juta)

Perbandingan dan perbedaan tingkat kemiskinan tertinggi

Berdasarkan teori Keynes (dalam Asdar, 2012), Indikator APBD terdiri dari:

1. Pendapatan daerah, adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang

menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah.

2. Belanja daerah, adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (Permendagri No. 13 Tahun 2006).
3. Pembiayaan daerah, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana kegiatan perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya kegiatan perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan *output*, sehingga proses ini yang pada gilirannya aliran balas jasa dapat dihasilkan terhadap faktor produksi yang

dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. (Debby, Ch, 2015: 4).

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh



Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi lebih menggambarkan kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya menggunakan indikator data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dari data BPS pertumbuhan ekonomi di Aceh Tw. I 2018 sebesar -1,24% (q to q) dan 3,26% (y on y).

Menurut analisis ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Slow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila

tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro, 2011).

Menurut Rahardja (2008: 178), Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode yaitu :

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$G_t$  = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

$PDRB_t$  = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDRB_{t-1}$  = PDBR satu periode sebelumnya

### Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (Survey oleh BPS). Garis kemiskinan merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial, dan menjadi agenda rutin setiap tahapan pembangunan. Kemiskinan ini ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. ( Debby, Ch, 2015: 5). Kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, “ kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” batasan dari sisi pengeluaran disebut sebagai garis kemiskinan (GK). (Wahyudi, 2011), (BPS, 2018). Berikut data persentase penduduk miskin daerah perkotaan dan pedesaan Provinsi Aceh 2015-2018.

**Tabel 3. Persentase penduduk miskin daerah perkotaan dan pedesaan Provinsi Aceh 2015-2018**

Tahun	Persentase penduduk miskin daerah perkotaan dan pedesaan Provinsi Aceh 2015-2018
Maret 2015	17,08
September 2015	17,11
Maret 2016	16,73
September 2016	16,43
Maret 2017	16,89
September 2017	15,92
Maret 2018	15,97

Sumber: data BPS (Susenas 2015-2018)

Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan:

- a. Kemiskinan absolut, yakni berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Garis Kemiskinan. Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa

hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Terdapat beberapa indikator kemiskinan, diantaranya:

a. *Headcount Index* (PO)

Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk

b. *Poverty Gap Index* (P1)/ Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan.

c. *Poverty Severity* (P2)/ Indeks Keparahan Kemiskinan

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dalam penelitian ini, indikator kemiskinan yang digunakan adalah Garis Kemiskinan (GK) (BPS,2018)

$$GK = GKM + GKNM$$

Tabel 4. Kriteria Garis Kemiskinan



Sumber: BPS, 2018.



Sumber: BPS (Susenas)

Grafik 5. Garis Kemiskinan

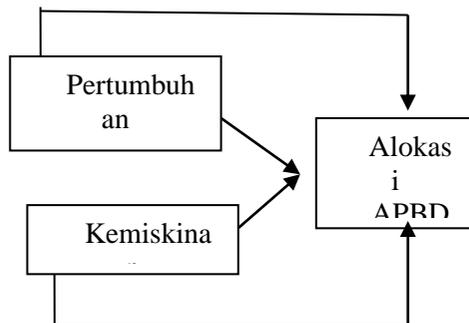
Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap Alokasi APBD

Tujuan pembangunan ekonomi yakni mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat diatasi, yang berakhir pada pengentasan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen dari kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan manajemen distribusi dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Semakin besar sumber daya birokrasi negara, dimana keadaan keuangan suatu Negara maka akan semakin besar perluasan pengeluaran publik untuk program kesejahteraan social (Tang ,2015). Hal ini disebabkan kapasitas keadaan yang lebih luas akan menyebabkan semakin banyak untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan dan mengelola pendapatan dan belanja yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, maka diperlukan pengalokasian anggaran yang tepat. Optimalisasi pendapatan dan selektifitas serta prioritas belanja akan menumbuhkan perekonomian yang berdampak

secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teoritis, maka kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  $H_{01}$ : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018.

$H_{a1}$ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018.

2.  $H_{02}$ : Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018

$H_{a2}$ : Kemiskinan berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018

3.  $H_{03}$ : Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh

terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018.

$H_{a3}$ : Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018.

## METODE PENELITIAN

### Desain penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh variabel independen pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap variabel dependen alokasi APBD melalui pengujian hipotesis. Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari peneliti meliputi hal-hal yang akan dilakukan penelitian mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam penelitian. (Sekaran 2006:162).

Desain penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian, tujuan studi ini adalah untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*) yang dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu.
2. Jenis Penelitian, penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap variabel dependen yaitu alokasi APBD.
3. Tingkat Intervensi Peneliti, peneliti tidak memiliki kemampuan dalam mengintervensi, baik merupakan mengendalikan maupun

memanipulasi data variabel, karena data variabel tersebut sudah ada.

4. Situasi Penelitian (*Study Setting*), mengingat tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap alokasi APBD maka diperlukan data dari lingkungan yang sebenarnya yaitu studi lapangan pada BPS Provinsi Aceh.
5. Unit Analisis penelitian ini adalah PDRB, GK dan APBD Provinsi Aceh.
6. Horizon Waktu, penelitian ini bersifat *cross sectional studies* yaitu data dikumpulkan sekaligus atau satu tahap (Sekaran, 2006:177).

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan angka-angka yang dapat dihitung maupun

diukur. Analisis kuantitatif ini dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat analisis statistik.

### Populasi dan sampel

Objek yang diteliti dilihat dengan menggunakan data APBD yang dilihat dari anggaran Tahun 2015-2018, data pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari kinerja perkembangan sektor ekonomi 2015-2018, dan data kemiskinan yang dilihat dari survey yang dilakukan BPS dengan indikator nya yaitu Garis Kemiskinan. Ruang lingkup penelitian terbatas pada data dan informasi mengenai alokasi APBD, PDRB sektor ekonomi dan Garis Kemiskinan. Pembatasan variabel ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Operasional variabel

Tabel 1.5 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Alokasi APBD	Suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.	Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah  Sumber: Asdar, 2012	Rasio
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.	$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$  Sumber: Rahardja (2008: 178)	Rasio
3.	Kemiskinan	Ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dilihat dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan	GK= GKM + GKNM  Sumber: (BPS,2018)	Rasio

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *field research*, yaitu data diperoleh dari data skunder yang bersifat kuantitatif dengan analisa regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS Versi 21.00. Perolehan data langsung diperoleh dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2015-2018. Teknik dokumentasi yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan variabel yang diteliti.

### Teknik analisis

Untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen menggunakan Analisis regresi. Adapun formulasi persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Alokasi APBD

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>2</sub> = Kemiskinan

b<sub>1</sub>.....b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

α = Konstanta

ε = tingkat kesalahan

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah perbandingan total variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel bebas X seperti ditunjukkan pada tabel 1.6 berikut:

**Tabel 6. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi**

$0\% \leq KD \leq 100\%$	Tingkat Hubungan
82% – 100%	Sangat Tinggi
49% – 80%	Tinggi
17% – 48%	Cukup Tinggi
5% – 16%	Rendah tapi pasti
0% – 4%	Rendah

Sumber: Hasan, iqbal (2013)

### Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap alokasi APBD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### Rancangan Hipotesis Secara Parsial

1. Menentukan hipotesis nol (H<sub>0</sub>) dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) untuk hipotesis pertama.

H<sub>01</sub> : β = 0 ; Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018.

H<sub>a1</sub> : β ≠ 0 ; Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018.

2. Menentukan hipotesis nol (H<sub>0</sub>) hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) untuk hipotesis kedua.

H<sub>02</sub> : β = 0 ; Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018.

H<sub>a2</sub> : β ≠ 0 ; Kemiskinan berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018.

**Pengujian Hipotesis Secara Bersama-Sama**

3. Menentukan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) untuk hipotesis ketiga

$H_{03}$  :  $R$  = Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018..

$H_{a3}$  : paling sedikit ada satu  $R = (i=1,2) \neq 0$ ; Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018.

Jika  $R = 0$ ;  $H_0$  diterima

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitaian ini, agar dapat menguji pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap variabel dependen yaitu alokasi APBD Provinsi Aceh. Tabel hasil uji koefisien regresi berdasarkan ketiga variabel dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	36,8586	52,3248		1,704	,010
1 PDRB	24,860	30,980	,403	,802	,017
KEMISKINAN	-2,334	7,201	-,163	-,324	,012

a. Dependent Variable: APBD  
 Sumber : Output SPSS (data diolah 2018)

Berdasarkan Tabel 7 maka hasil uji regresi linear berganda dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = 36,86 \alpha + 24,860X_1 - 2,334X_2 + \epsilon$$

**Koefisien Determinasi**

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari nilai

koefisien korelasi ( $R$ ) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang berada antara nol dan satu. Hasil nilai *adjusted R Square* dari regresi untuk mengetahui besarnya alokasi APBD yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. berdasarkan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Koefisien korelasi dan determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,507 <sup>a</sup>	,527	,515	32,31912

Sumber : Output SPSS (data diolah 2018)

Berdasarkan tabel tersebut, koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted

R Square sebesar 0,515. Hal ini mengindikasikan bahwa 51,5% variabel dependen yaitu alokasi APBD dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sedangkan sisanya sebesar 48,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

Nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 51,5% sesuai kategori memiliki peranan yang tinggi, sesuai dengan Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi APBD memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

### **Pengujian hipotesis**

#### **Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh Periode 2015-2018.**

Berdasarkan rumusan hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap alokasi APBD (Y) apabila ( $\beta = 0$ ). Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima  $H_{a1}$  (hipotesis alternative 1) atau menolak  $H_{01}$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018.

Nilai koefisien adalah sebesar 24,86. Dengan kata lain, koefisien regresi 24,86 memiliki makna bahwa jika variabel pertumbuhan naik sebesar

100%, maka nilai alokasi APBD akan naik sebesar 24,86% pada Provinsi Aceh 2015-2018.

#### **Pengaruh kemiskinan terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh Periode 2015-2018.**

Berdasarkan rumusan hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa kemiskinan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap alokasi APBD (Y) apabila ( $\beta = 0$ ). Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima  $H_{a2}$  (hipotesis alternative 2) atau menolak  $H_{02}$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh 2015-2018.

Nilai koefisien kemiskinan adalah sebesar -2,334 memenuhi persyaratan penerimaan hipotesis  $H_{a3}$ :  $\beta \neq 0$ , artinya kemiskinan berpengaruh negatif terhadap alokasi APBD. Besarnya nilai koefisien regresi kemiskinan adalah -2,334, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel kemiskinan sebesar 100% akan mengakibatkan alokasi APBD Provinsi Aceh turun sebesar 23,34% pada periode 2015-2018, begitu juga sebaliknya, setiap penurunan variabel kemiskinan sebesar 100% akan mengakibatkan alokasi APBD Provinsi Aceh naik sebesar 23,34% pada periode 2015-2018.

#### **Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh Periode 2015-2018.**

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap alokasi APBD tidak sama dengan 0 (nol), yakni ( $R^2$ ) sebesar 0,527. Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,527 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh

terhadap alokasi APBD sebesar 52,7%, sedangkan sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini ( $\epsilon$ ).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat terhadap alokasi APBD yaitu sebesar 52,7 %.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap alokasi APBD yaitu hanya sebesar 24,86%.
3. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap alokasi APBD Provinsi Aceh periode 2015-2018. Kemiskinan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap alokasi APBD yaitu hanya sebesar 23,4%.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga penelitian ini mempunyai kelemahan yaitu :

- a. Periode waktu terlalu singkat yaitu 2,5 tahun sehingga memungkinkan hasil penelitian kurang representatif.
- b. Masih banyak faktor yang

mempengaruhi alokasi APBD yang belum dikaji dalam penelitian ini.

### **Saran**

1. Pemerintah Aceh supaya lebih bijaksana lagi pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar alokasi dana yang dibelanjakan dapat digunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pengentasan kemiskinan.
2. Dalam pengalokasian belanja daerah, diharapkan pemerintah Aceh dapat memberikan alokasi yang lebih besar dibidang ekonomi untuk kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta peningkatan pemberdayaan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan IPM di Provinsi Aceh.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap alokasi APBD, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel yang berpengaruh terhadap penelitian dan menambah periode pengamatan sehingga dapat diperoleh perhitungan yang lebih akurat dan pembahasan yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Afriana. (2016). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Jumlah Penduduk, Terhadap Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2014. Skripsi.

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Asdar. (2012). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. Diambil pada tanggal 26 Mei 2013 dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3574>
- Bappenas. (2004). Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta.
- Debby Ch. dkk. (2016). Jurnal Pembangunan ekonomi dan keuangan daerah. Vo. 18, No.3.
- Fatmi, (2010). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1998-2008. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, Iqbal. (2013). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Edisi kedua). Bumi Aksara. Jakarta.
- Khuzaironi. (2015). Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lasminingsih. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Online. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20732/2/Reference.pdf>, diakses tanggal 30 September 2018.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mudrajad, Kuncoro. (2011). Ekonomi Pembangunan, Teory Masalah dan Kebijakan, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Paramita, C. C. (2012). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. PLN (PERSERO) APJ Semarang. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 1 No.1, 1-11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Diambil pada tanggal 22 Mei 2013 dari [http://sipkd.jakarta.go.id/sipkddk/pp/permendagri\\_13\\_2006](http://sipkd.jakarta.go.id/sipkddk/pp/permendagri_13_2006)
- Rahardja, dkk. (2008). Teori Ekonomi Makro. Edisi Ke empat: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sekaran, Uma. (2011). Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat.
- Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah.
- Wahyudi. (2011). Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.